

PESANTREN DAN PERKEMBANGAN POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA

Oleh: Irham¹

Abstrak

Makalah ini membuktikan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan agama di Indonesia yang akomodatif dengan perkembangan sosial budaya bangsa dan pendidikan yang memuat nilai-nilai multikultural. Selain itu makalah ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan agama di Indonesia sebuah upaya perjuangan tidak semata-mata diberikan. Makalah ini mendukung pernyataannya Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang akomodatif dan inklusif. Dan membantah teorinya Dietrich Reetz dan Tahir Mehmood Buut yang mengatakan bahwa pendidikan agama sebagai sumber untuk mengembangkan ideologi radikal dan fundamental.

Kata Kunci: *Pesantren, Pendidikan Agama, Pendidikan Keagamaan.*

PENDAHULUAN

Data yang menunjukkan konflik sosial di dunia ini terus meningkat. Kerap kali konflik yang terjadi mengatasnamakan agama. Survei tahun 1900-2000 perang sipil karena sentimen agama, fundamentalisme agama dari waktu-kewaktu terus meningkat. Representasi Islam lebih tinggi dalam perang saudara hingga mencapai 81% dibanding agama lain. Bahkan kerap kali terjadi konflik/pertentangan sosial dibingkai dengan atas nama agama, karena bisa menarik domestik dan dukungan luar.² Di Indonesia, kasus serupa juga terjadi, seperti perang antar etnis di Maluku, Ambon, kasus bom Bali, pemboman hotel JW Marriot, konflik Sunni-Syiah, hampir semua berdalih karena agama.³ Tindakan radikal yang menimbulkan konflik sosial berdalih agama,⁴ karena pengaruh dari pola pendidikan agama yang tidak

¹ Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Konsentrasi Pendidikan Islam dan Peneliti International Center for Islam and Pluralism (ICIP Global), email Email: irham.yuwanamu@gmail.com

²Lihat, Monica Duffy Toft, "Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War," *International Security*, Vol. 31, No. 4 (2007): 97-131, <http://www.jstor.org/stable/4137567>. (accessed May 28, 2014).

³Sejak masa reformasi, konflik berdimensi komunal merebak, konflik bernuansa separatis, fenomena gerakan fundamentalis keagamaan, dan konflik sosial-politik kian mengemuka. Baca, Lambang Trijono, dkk. (eds.), *Potret Retak Nusantara Studi Kasus Konflik Di Nusantara*, (Yogyakarta: UGM, 2004).

⁴Kecenderungan konflik sosial yang disebabkan fundamentalisme agama sangat kuat, walaupun sebenarnya banyak sebab-sebab lain. Kadang-kadang melakukan kekerasan dengan dalih pembenaran dari agama untuk orang-orang atau kelompok tertentu. Baca, Ahmad Ansori & Indriyani Makrifah, "Model Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam," *Mukaddimah*, Vol.19, No.1 (2013): 91.

memandang nilai-nilai multikultural⁵ yang mengarah pada fundamentalisme agama.⁶ Dietrich Reetz menyatakan pendidikan agama sebagai jaringan pendidikan yang eksklusif, fundamental, dan radikal.⁷ Sama juga yang dinyatakan Tahir Mehmood Butt bahwa lembaga pendidikan agama adalah sumber dari idiologi radikal, yang pada akhirnya membuat kekacauan sosial.⁸

Kemudian Sarfaroz Niyozov mengatakan bahwa para pendidik agama masih pada tataran wacana dalam hal rasisme. Ia menjelaskan belum ada lembaga pendidikan agama yang sudah menjalankan program pendidikan bebas rasisme. Sehingga benih-benih konflik karena perbedaan SARA belum bisa tertangani dengan baik.⁹ Senada dengan yang dikatakan Abdulkader Tayob bahwa masyarakat beragama dalam melakukan proses penyebaran agama, tidak melihat perkembangan teknologi, konteks sosial dan politik. Dakwah atau pendidikan yang dilakukan cenderung tidak akomodatif dan tidak bisa menyesuaikan konteks sosial. Agama belum mampu berekspresi dengan kondisi lokal. Nilai-nilai ajaran belum mewarnai kehidupan publik, seperti kesehatan, pernikahan, konsumsi, hubungan antar agama, dan pendidikan Islam dianggap belum bisa melihat sejarah sosial, belum menyentuh

⁵Nilai-nilai multikultural ini merupakan semangat pluralisme dari perbedaan jenis kelamin, kemampuan seseorang, status sosial, etnik, agama, bahasa, dengan mengedepankan toleransi, demokrasi, kebebasan berekspresi dan beraktualisasi, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Lihat, Soner Polat, "The Attitudes of School Directors to the Multiculture Education in Turkey," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol.2 No.2 (2011): 385-393.

⁶Fundamentalisme disini dimaknai sebagai prinsip dasar keagamaan yang tidak menerima perubahan modern dan menginginkan tradisi keagamaannya tetap. Singkatnya bisa dikatakan konservatif. Fundamentalisme agama muncul karena dampak adanya sekularisasi dan modernitas/liberalisasi agama yang telah menenggelamkan tradisi-tradisi lama agama yang berseberangan dengan prinsip modernitas. Dengan itulah Fundamentalisme agama tumbuh bergerak dengan dalih pemurnian dan kembali pada sumber asli agama. Lihat, Michael O Emerson, David Hartman, "The Rise Religious Fundamentalism," *Annual Review Of Sociology* 32 (2006): 127-144.

⁷Dietrich Reetz, "Travelling Islam – Madrasa Graduates from India and Pakistan in the Malay Archipelago," *ZMO Working Papers* 8, (2013): 1-19, http://www.zmo.de/publikationen/WorkingPapers/reetz_2013.pdf. (accessed May 29, 2014).

⁸Tahir Mehmood Butt, "Social and Political Role of Madrassa: Perspectives of Religious Leaders in Pakistan," *South Asian Studies Vol.27 No.2* (2012): 387-407, http://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/6.%20Tahir%20Mehmood%20Butt_V28_no2_12.pdf. (accessed June 2, 2014).

⁹Sarfaroz Niyozov, "Teachers and Teaching Islam and Muslims in Pluralistic Societies: Claims, Misunderstandings, and Responses," *Int. Migration & Integration* 11, (2010): 23–40.

dan memanfaatkan teks dan ide-ide masa lalu untuk memasukkan cara-cara mereka dalam cara berpikir kreatif dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Namun pandangan diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Yue Sum Sharon Lai dan Kaili Chen Zhang yang mengatakan, pada dasarnya agama menjadi peran penting dalam memberikan kontribusi bagi layanan pendidikan inklusif, bukan sebaliknya.¹¹ Didukung oleh Mansoor Moadded yang menggambarkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan otoritas keagamaan sebagai sumber pengetahuan tentang peran sosial politik, dan berkehidupan sosial.¹² Bisa dipahami jika pemahaman keagamaan sempit dan eksklusif tidak menutup kemungkinan akan cenderung lebih tertutup dan tidak menerima keragaman.

Kemudian Masooda Bano menjelaskan bahwa pendidikan agama mampu bermitra dengan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang terbuka dan saling menguatkan. Penguatan pendidikan agama dengan pendidikan sekuler bisa mengurangi militansi siswa.¹³ Menurut Chang-Yau Hoon, pendidikan agama bisa membentuk dan memelihara budaya dan identitas. Pendidikan agama juga berperan membangun siswa agar mampu bernegosiasi dengan perbedaan.¹⁴

Dalam makalah ini penulis akan membuktikan bahwa pendidikan agama mampu bertegur sapa dengan kearifan lokal, menerima perubahan, peka dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, cinta damai, cinta tanah air, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural, membentuk insan salih pribadi dan salih sosial. Sehingga pendidikan agama bisa menepis tindakan radikalisme atas nama agama, ataupun konflik yang berdasarkan unsur SARA.

PESANTREN PENDIDIKAN AGAMA YANG AKOMODATIF DAN BERDIMENSI MULTIKULTUR

Penulis akan menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah inklusif. Penulis membuktikannya dengan mengkaji implementasi pendidikan agama Islam di lembaga pesantren di Indonesia. Menurut Azyumardi Azra bahwa pesantren

¹⁰Lihat, Abdulkader Tayob, "Politics and Islamization in African Public Spheres," *Islamic Africa*, Vol. 3, No. 2 (2012): 139-168, <http://www.jstor.org/stable/42636199>, (accessed May, 28 2014).

¹¹Yue Sum Sharon Lai, Kaili Chen Zhang, "A Comparison on Inclusive Practices for Children with Special Needs in Faith-Based Kindergartens in Hong Kong," *J Relig Health* 53 (2013) : 809–824.

¹²Lihat, Mansoor Moadded, Stuart A. Karabenick, "Religious Fundamentalism among Young Muslim Agypt and Saudi Arabia," *Social Forces*, Vol. 86, No. 4 (2008): 1675-1710.

¹³Masooda Bano, "Madrasas as Partners in Education Provision: The South Asian Experience," *Development in Practice*, Vol. 20, No. 4/5 (2010): 554-556. <http://www.jstor.org/stable/20750152> (accessed June 10, 2014).

¹⁴Chang-Yau Hoon, "Mapping 'Chinese' Christian Schools in Indonesia: Ethnicity, Class and Religion," *Asia Pacific Educ. Rev.* (2011): 403-41.

merupakan pendidikan agama Islam tradisional di dunia yang mampu bertahan hingga kini karena akomodatif dan bisa melakukan penyesuaian diri, berakulturasi dengan budaya setempat.¹⁵ Sehingga alasan inilah penulis melakukan pengkajian pendidikan Islam di pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang dinamis. Cara penggalan data penulis adalah dengan metode penelitian kepustakaan. Sumber primernya adalah dari berbagai tulisan hasil riset yang terbit dalam bentuk buku maupun dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional yang berkenaan dengan kepesantrenan. Karya dari para penulis Indonesia maupun penulis Asing. Dianalisis dengan cara komparatif konstan.

1. Pesantren

Sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam itu sendiri. Awalnya dilakukan oleh para pendatang (pedagang-saudagar) yang beragama Islam dengan tanpa mengenal batas ruang dan waktu untuk mengenalkan Islam kepada siapapun yang ditemui. Mula-mula dakwah dan pendidikan Islam dilakukan dengan cara memberikan suri teladan yang baik, kemudian mengenalkan kitab suci, pengetahuan cara-cara ibadah, dan selanjutnya penanaman akidah.¹⁶

Pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang seperti yang dikenal dengan sebutan pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah. Pesantren, pondok sebutan untuk wilayah Jawa, surau untuk Sumatera Barat, dayah untuk wilayah Aceh. Pondok, pesantren, surau, dan dayah merupakan pendidikan Islam tradisional yang kurikulum pendidikannya diatur oleh pengasuh (kyai: Jawa), dan sekarang pendidikan Islam tradisional secara umum disebut dengan pesantren. Kalau madrasah bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia yang modern dan kurikulumnya diatur secara Nasional oleh Kementerian Agama. Pendidikan pesantren mempunyai tiga tradisi penting, yaitu tranmisi pengetahuan agama, menjaga tradisi Islam dan ketiga reproduksi ulama.¹⁷ Pesantren merupakan pendidikan tertua sebelum ada bentuk pendidikan-pendidikan lain, dan sebelum bangsa kolonial masuk ke Indonesia. Pesantren masih kuat bertahan hingga kini. Dalam catatan sejarah pesantren mulai berkembang pesat sejak keberadaan Wali

¹⁵Lihat, Ayumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mellinium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), 107-116.

¹⁶Lihat, Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah, Cetakan ketiga, 2008), 11-15.

¹⁷Baca, Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, "Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society", *Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University*, Cura (May, 6-7, 2005), 1-4.

Songo. Dan tokoh yang dianggap paling berhasil adalah Sunan Ampel, yang kemudian bermunculan pesantren-pesantren lain.¹⁸

Menurut Zamakhsyari Dhofier akar dan sejarah pesantren pada abad 12 dengan terbangunnya kesultanan Islam Lamreh yang dibarengi juga dengan berkembangnya pemikiran Imam Syafii, Abu Musa al-Asyari, al-Maturidi, dan al-Juneidi. Kemudian dibuktikannya dengan adanya Batu Nisan Hamzah Fansuri. Batu tersebut menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara menggantikan peradaban Majapahit pada pertengahan abad 14. Selanjutnya Hamzah Fansuri berhubungan dengan Wali Songo. Dari situlah pendidikan Islam terus berkembang.¹⁹

Pesantren sebagai wujud dari lembaga yang berakulturasi dengan budaya lokal. Akulturasi dan asimilasi budaya pada pesantren dilakukan sejak mulai berdirinya pesantren itu sendiri. Pendidikan pondok pesantren sebagai bentuk asimilasi pendidikan Syiwa-Buddha yang disebut *dukuh* (asrama) yang dilakukan Wali Songo. Dengan memformat sesuai ajaran Islam untuk memformulasikan nilai-nilai sosiokultural religius yang dianut masyarakat Syiwa-Buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama memformulasikan nilai-nilai Ketauhidan Syiwa-Buddha (*adwayasashtra*).²⁰

Maimun Aqsha Lubis menjelaskan pesantren merupakan lembaga yang berperan sebagai pendidikan agama. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan kurikulum dan praktik pendidikan Islam pesantren. Pesantren telah berperan penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia yang multikultur, seperti ada banyaknya kelompok etnik, status sosial, ekonomi, dan kelompok pendidikan agama. Pesantren mampu mengejawentahkan nilai-nilai yang berkarakteristik moral-etika, keimanan-ibadah, pengetahuan dan nasionalisme untuk negara. Pesantren menerapkan kurikulum identitas diri.²¹

Sesuai dengan tujuan dasarnya, pendidikan pesantren untuk menjadikan orang seutuhnya yang terkandung pada pandangan dasar Islam, berkenaan dengan manusia dan signifikansi dengan ilmu pengetahuan. Tujuannya tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan manusia yang saleh pribadi dan saleh sosial. Dalam konsep al-Quran adalah manusia yang bisa membawa Islam

¹⁸Lihat, Ahmad Syafi'i Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, (Jakarta: Prenada, 2009), 15-44.

¹⁹Baca Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 26-37.

²⁰Baca, Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta*, (Jakarta: Pustaka IIMan, 2012), 130-131.

²¹Maemun Aqso Lubis, dkk, "The Application of Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia," *Issue 8, Vol 6* (2009): 401-1411, www.academia.edu/990508/The_application_of_multicultural_education_and_applying_ict_on_pesantren_in_south_sulawesi_indonesia?login=irham.yuwanamu@gmail.com&email_was_taken=true, (accessed May 28, 2014).

sebagai *rahjmatil lil'alamina*. Tujuan tersebut bukan bermaksud untuk menumbuhkan mental-mental tertutup, tidak menerima keragaman, radikal, suka berkonflik dan penyimpangan sosial.²²

Hemat Penulis bahwa pesantren selain sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren sebagai sumber perubahan sosial budaya, pembangun peradaban bangsa, problem solving kepada masyarakat, dan bagian dari budaya masyarakat itu yang mempunyai keunikan dan karakter tersendiri.

2. Ciri-Ciri Umum Pesantren

a. Elemen Pesantren

Ada lima elemen pokok bisa disebut dengan pesantren. Kelima elemen tersebut adalah pondok, masjid, santri, kyai, dan pengajaran kitab kuning. Pondok adalah tempat tinggal yang dibangun untuk santri yang bermukim. Kemudian masjid sebagai elemen yang tidak bisa dipisahkan dengan pondok. Karena merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan pesantren. Pengajaran kitab klasik sebagai elemen pokok dalam pesantren. Elemen ini sebagai pendalaman ilmu keagamaan dan mendidik santri sebagai calon-calon ulama. Kemudian kyai dan santri. Kyai adalah pemilik pesantren yang alim yang mendidik para santri mempelajari kitab-kitab klasik. Santri sebagai peserta didik yang mengaji kitab klasik dengan kyai. Ada santri mukim yang berasal dari daerah jauh dan menetap di pondok dan ada santri *kalong* yaitu santri yang berasal dari daerah terdekat pondok dan tidak menetap di pesantren. Ada tiga jenis kelompok dalam pesantren. Pertama kelompok pesantren besar yang memiliki santri lebih dari 2000. Kedua pesantren menengah yang mempunyai santri 1000 sampai dengan 2000. Ketiga pesantren kecil yang jumlah santrinya dibawah 1000.²³

Menjadi santri tidak hanya sekedar menjadi peserta didik mengaji kitab klasik bersama kyai. Dalam tradisi pesantren istilah santri tetap melekat walau sudah keluar dari pesantren. Ada makna lain santri selain memperdalam keilmuan agama ketika Indonesia masih dalam penjajahan kolonial. Makna lain itu adalah menjadi santri siap berjuang membela negara, mengusir penjajah dan tidak bergantung dengan penguasa kolonial. Sikap kebangsaan ini selalu ditekankan di pesantren.²⁴

²²Lihat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Mellinium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), 4-9.

²³Baca Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 78-100.

²⁴Baca Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2a Buku II: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*, (Jakarta: Pustaka Afid, cet. 3, 2013), 83-131.

Sistem pengajaran di pesantren diatur oleh sang pengasuh sendiri tidak melibatkan sistem pengajaran pendidikan Nasional. Penyampaian materi pengajaran dilakukan setelah shalat fardhu dengan jadwal yang sudah ditentukan pengasuh. Umumnya ada dua metode pengajaran. Yaitu pengajaran dengan sistem sorogan dan sistem bandongan. Sistem sorogan adalah sistem belajar yang individual dimana santri menghadap guru atau kyai dengan membawa kitab yang sudah ditentukan. Guru atau kyai menyimak dan mengevaluasi secara langsung kepada santri. Berbeda dengan sistem belajar bandongan. Sistem ini adalah sistem belajar klasikal. Santri secara bersama/berkelompok menghadap guru, mendengarkan pengajaran guru. Sistem ini juga sering disebut dengan sistem *halaqoh*. Kitab-kitab yang sering dikaji adalah Nahwu-Shorof, Fiqh, Ushul Fiqh, Hadist, Tafsir, Tauhid, Tasawuf, dan Akhlak. Cabang lain seperti ilmu Balaghah dan Tarikh.²⁵

Ada dua model pesantren yang berkembang hingga saat ini. Yaitu pesantren salaf dan pesantren modern. Pesantren salaf adalah pesantren yang masih menggunakan sistem seperti pesantren-pesantren zaman dahulu. Perencanaan kurikulum sesuai dengan keinginan pengasuh, metode belajar masih sorogan dan bandongan. Jika pesantren modern selain menjaga sistem lama juga mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Seperti perhatian pada bahasa asing, menggunakan sistem sekolah, yaitu dengan adanya madrasah-madrasah, mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan Nasional, menggunakan media teknologi dalam pembelajaran, dll.

b. Faham Keagamaan

Pesantren merupakan prasarana para kyai menyebarkan faham keagamaan *Ahlussunnah wal jama'ah* yang biasa disebut dengan istilah Aswaja. Seperti halnya yang dianjurkan oleh KH. Hasyim Asyari untuk mengikuti para ulama-ulama aswaja yang mengikuti ajaran-ajaran imam pendiri mazhab empat. Dengan demikian akan menjadi kunci sebagai pintu ilmu pengetahuan agama Islam.²⁶ Sebagian besar para pengasuh pesantren adalah dibesarkan dari tradisi keilmuan pesantren. Sehingga jaringan pesantren di Nusantara dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap bersambung.

KH. Bisyr Mustofa secara eksplisit menjelaskan faham aswaja yaitu faham yang berpegang teguh dalam hukum Islam menganut ajaran salah satu mazhab empat. Kedua bidang tauhid menganut ajaran Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan Imam Abu Hassan al-Asyari. Dan ketiga bidang Tasawuf menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim al-Junaidi. Keagamaan warga pesantren ini

²⁵Baca Ahmad Syafii Noor, *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, (Jakarta: Prenada, 2009), 71-73.

²⁶ Hasyim Asyari, *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama*, (Penerbit Menara Kudus 1971), 19.

berbeda dengan keagamaan masyarakat muslim modernis. Kaum muslim-modern dalam menjalankan keagamaannya dengan cara purifikasi/pemurnian Islam yaitu kembali pada Quran dan Hadis tanpa mengikuti ajaran mazdhab.²⁷

c. Kurikulum Pesantren

Hampir semua studi kepesantrenan tidak ditemui kurikulum yang baku yang digunakan oleh pesantren. Menurut Lukens-Bull seperti yang dikutip oleh Abdullah Aly secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) pendidikan agama, (2) pengalaman dan pendidikan moral, (3) sekolah dan pendidikan umum, (4) keterampilan dan kursus.

Kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam biasa disebut dengan istilah *ngaji*. Ada dua tingkatan *ngaji* dalam kurikulum ini. Pertama *ngaji* tingkat paling awal. Tingkatan ini adalah belajar membaca dan menulis al-Quran, tingkatan berikutnya adalah *ngaji* kitab-kitab klasik, dikalangan pesantren disebut dengan kitab kuning. Selanjutnya adalah kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Pengalaman dan pendidikan moral oleh pesanten menjadi sebuah kegiatan yang penting. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang paling ditekankan dalam pesantren adalah kesalehan dan komitmen para santri terhadap lima rukun Islam, disamping itu penekanan pada nilai kesederhanaan dan keikhlasan dengan dibiasakan melalui kebersamaan. Yang ketiga kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pada kurikulum ini pesantren mengintegrasikan dengan kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum ini diberlakukan di madrasah yang dibangun oleh pesanten. Dan terakhir kurikulum yang berbasis keterampilan dan kursus. Pesantren memberlakukan kurikulum ini melalui kegiatan ekstra kulikuler pesantren/madrasah. Seperti kursus bahasa inggris, perbengkelan, pertanian, dlsb.²⁸

d. Pendidikan Multikultural Di Pesantren

Semangat pendidikan Islam pesantren sesuai dengan nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia yang bisa menjadikan masyarakat beragama yang santun, ramah dan beradab. Semangat multikulturalisme karena untuk menghindari terjadi konflik yang bernuansa perbedaan SARA.

²⁷Baca Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 228-257.

²⁸Baca Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 183-192.

1) Wawasan Multikultural

Dalam sejarahnya Multikulturalisme sebagai paham yang berkembang di AS pada dekade 1960 dan awal 1970-an. Gagasan ini sebagai jawaban terhadap permasalahan sosial yang melanda di AS dan Kanada sejak itu. Yaitu terjadinya diskriminasi sosial karena perbedaan ras dan kebudayaan yang pada akhirnya menjadi konflik horisontal. Multikulturalisme berupaya mendamaikan perbedaan tersebut dengan cara saling mengakui, menghargai, toleransi, terhadap perbedaan ras, budaya, agama, dan bahasa. Dengan demikian persoalan sosial karena perbedaan akan dapat diatasi. Dalam perkembangannya multikulturalisme menjadi kebijakan politik pemerintahan. Dan selanjutnya menjadi kebijakan strategis melalui dunia pendidikan.²⁹

Menurut Tilaar multikulturalisme adalah cara untuk mewujudkan dunia yang sejahtera, aman, saling menghargai dan mengakui terhadap perbedaan. Selain itu juga multikulturalisme berupaya meluaskan pandangan bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kelompok, tetapi kebenaran dapat juga dimiliki oleh kelompok lain.³⁰ Tilaar menyebutkan multikulturalisme sebagai fungsi kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), dan sebagai legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya.

Sejarah Bangsa Indonesia sesungguhnya sudah melakukan upaya itu sebelum konsep multikulturalisme mengemuka di dunia. Wujud Indonesia sudah melakukan upaya multikulturalisme pertama adanya sejarah kongres sumpah pemuda yang ke-II tahun 1928 yang melahirkan sumpah pemuda. Kedua wujudnya falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 dengan sembojannya *Bheneka Tunggal Ika*.³¹ Pada konteks sekarang, perlunya mengembangkan konsep multikulturalisme³² di Indonesia tidak lain karena untuk menjaga dan merawat kemajemukan dan keragaman yang ada dan sudah terbangun oleh para pendahulu, selain karena untuk merespon era globalisasi. Strategi yang paling tepat dalam merawat dan menjaga kemajemukan adalah

²⁹Lihat James S Bnks, *An Introduction To Multicultural Education*, (United States of America: Pearson, 2008).

³⁰H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta:PT Gramedia,2004),93.

³¹Baca HAR Tilaar, "Multikulturalisme, Bahasa Indonesia, dan Nasionalisme dalam Sistem Pendidikan Nasional," Makalah Disampaikan pada Seminar Internasional bertema, *Pendidikan Berbasis Keragaman Budaya: Sumbangan Bahasa dan Sastra Indonesia*, di Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4-6 November 2014.

³²Multikulturalisme sebagai politik kebudayaan untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan masyarakat minoritas yang berbeda dan beragam. Baca Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2014), 235-254.

melalui pendidikan dengan konsep multikultural.³³ Pendidikan berwawasan multikultural sebagai strategi pendidikan yang efektif diterapkan kepada masyarakat yang multikultur atau sekelompok orang yang saling bertentangan, atau sedang konflik karena kesalahpahaman yang disebabkan perbedaan budaya. Sehingga pendidikan ini untuk menciptakan sebuah hubungan pertemanan yang baik antar sesama, saling mempercayai, dan harmonis.³⁴

Sedangkan Paul C. Gorski, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural sebagai proses transformasi. Ada tiga bagian transformasi yang dilakukan, yaitu; transformasi terhadap diri pribadi (*the transformation of self*), transformasi pendidikan di sekolah (*the transformation of school and schooling*), dan transformasi sosial (*the transformation of society*). Ketiga tujuan transformasi ini dimasukkan dalam rumusan kurikulum pendidikan dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap segala aspek pendidikan, seperti persiapan guru, materi pendidikan, kurikulum, ruang kelas, praktik konseling, dan *assessment*.³⁵

Pendidikan multikultural³⁶ dalam hal ini untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai pluralisme dan mengurangi gesekan-gesekan/ketegangan yang diakibatkan perbedaan dalam masyarakat, selain itu untuk mengedukasi prasangka sosial yang ada di masyarakat. Semangat dasar pendidikan Islam multikultural ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan multikultural itu sendiri yaitu meningkatkan kesadaran humanis, pluralis, dan demokratis.³⁷

Pendidikan multikultural adalah sangat penting untuk mewujudkan kedamaian di masyarakat. Terutama untuk pendidikan agama Islam. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. Dalam penelitiannya Mansoor Moadded menggambarkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan otoritas keagamaan sebagai sumber pengetahuan tentang peran sosial politik

³³Baca Azyumardi Azra, *Merawat Kemajuan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

³⁴Li Wei, "Integration of Multicultural Education into English Teaching and Learning: A Case Study in Liaoning Police Academic," *Academi Publisher*, vol. 3, no. 4 (2013): 612-619.

³⁵Paul C. Gorski, *Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations*, (New York: McGraw-Hill, 2005): 12-15.

³⁶Konsep ini digagas sebagai alternatif sistim pendidikan untuk menangani konflik sosial di AS yang pada waktu itu sistim pendidikan yang digunakannya monokultur. Pendidikan multikultural tujuannya untuk menjembatani keragaman siswa, mulai bahasa, etnik, kultur, status sosial, ras, supaya terhindar dari diskriminasi dan konflik. Baca, James S. Banks, *An Introduction To Multicultural Education*, (United States of America: Pearson, 2008).

³⁷Ahmad Ansori & Indriyani Makrifah, "Model Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam," *Mukaddimah*, Vol.19, No.1 (2013): 95.

Islam, dan berkehidupan sosial.³⁸ Bisa dipahami jika pemahaman keagamaan sempit dan eksklusif tidak menutup kemungkinan akan cenderung lebih tertutup dan tidak menerima keragaman.

Semangat dasar pendidikan Islam Multikultural ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan multikultural itu sendiri yaitu meningkatkan kesadaran humanis, pluralis, dan demokratis. Maka dengan ini akan bisa memahami konsep Bhineka Tunggal Ika secara utuh.³⁹

2) Pendidikan Multikultural Dalam Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh Nasional maupun Internasional yang moderat dan toleran. Seperti halnya KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, Gusdur, Cak Nur, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi ukuran pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang mengeluarkan produk keberagaman santri yang inklusif. Pada bab ini penulis menguraikan model pendidikan di pesantren yang bernuansa multikultural studi kasus di pesantren Assalam Surakarta hasil penelitian dari Abdullah Aly.

Abdullah Aly mengatakan bahwa pesantren telah melakukan pendidikan yang berbasis multikultural. Pesantren yang ia teliti ini mempunyai lembaga pendidikan madrasah yang dikelola secara modern. Abdullah Aly menyimpulkan bahwa perencanaan kurikulum dipesantren tersebut memenuhi dua nilai multikulturalisme yaitu demokrasi dan keadilan. Kedua, implementasi kurikulum tersebut menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Nilai-nilai multikultural didalam implementasi tersebut ditemukan seperti nilai demokrasi, nilai solidaritas, nilai kebersamaan, nilai kasih sayang, memaafkan, serta nilai perdamaian dan toleransi. Ketiga model pengembangan dan evaluasi kurikulum pendidikan dengan mempertimbangkan aspek multikultural yang ada di pesantren.

Nuansa multikultural dalam kurikulum pesantren karena dari visi-misi pesantren yang mengedepankan nilai-nilai multikultural. Semangat inti dari visi-misi pesantren Assalam ini adalah memotivasi santri mampu memberikan jawaban atas masalah zaman, selanjutnya memadukan secara harmonis tradisi pesantren dengan sistem persekolahan mutakhir, mungubah citra negatif terhadap pesantren, menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang kredibel, berkualitas, pendidikan perdamaian dengan semua golongan.

³⁸Lihat, Mansoor Moadded, Stuart A. Karabenick, "Religious Fundamentalism among Young Muslim Egypt and Saudi Arabia," *Social Forces* Vol. 86, No. 4 (2008): 1675-1710.

³⁹Ahmad Ansori & Indriyani Makrifah, "Model Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam," *Mukaddimah*, vol.19, no.1 (2013): 95

Pendidikan pondok diselenggarakan dalam tiga bentuk kurikulum. Pertama kurikuler, kedua ko-kurikuler, ketiga ekstra kurikuler. Kurikulum kurikuler ditekankan pada aspek kognitif karena terkait dengan persekolahan. Dan kurikulumnya mengacu pada kurikulum pendidikan Nasional. Kemudian kurikulum ko-kurikuler mengarah pada aspek afektif karena diselenggarakan melalui model pengalaman hidup. Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan yang kurikuler. Beberapa kegiatan ko-kurikuler ini meliputi *muhadharah, muhadastah, qiroatul kutub wal quran, dirasaat hadist wal tafsir*. Kurikulum yang ekstrakurikuler merupakan kurikulum yang sifatnya psikomotorik, karena diselenggarakan melalui model pendidikan keterampilan.

Ada tiga muatan nilai-nilai multikultural dalam pelaksanaan di pesantren ini. Pertama muatan multikultural di materi ajar. Kedua implementasinya, dan ketiga evaluasi. Materi ajar yang digunakan untuk pembelajaran secara umum seperti yang dilakukan di pondok pada umumnya, bahkan ada juga yang mengadopsi materi ajar dari pesantren modern Gontor. Kemudian santri yang akan lulus ditekankan pada lima kemampuan dasar. Yaitu; (1) santri memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, (2) santri yang ber-*tafaqquh fi> al-di>n*, (3) santri yang memiliki sikap akhlaqul karimah, (4) santri yang memiliki kesiapan berjihad *fi> sabi>lillah*, (5) santri yang berdiri diatas semua golongan.

Pada tataran implementasi kurikulum di pondok maupun dimadrasah mengutamakan pada pencapaian kompetensi santri dalam berpikir atau berperilaku. Atau sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Nilai-nilai multikultural yang masuk dalam implemtasi adalah seperti nilai demokrasi, solidaritas, kebersamaan, kasih sayang, saling memaafkan, dan toleransi. Pada tataran evaluasi, nilai multikultural yang ditemukan adalah dua hal yaitu evaluasi input dan proses. Dalam praktiknya yaitu sekeretaris pondok mengadakan rapat bersama dan bermusyawarah. Semua peserta/santri mempunyai kesempatan yang sama, bebas usul, berpendapat, menyampaikan saran, dan kritik. Hal ini kompatibel dengan nilai demokrasi. Hanya saja yang masih belum dilakukan adalah evaluasi kurikulum terhadap perilaku/keberagamaan santri.⁴⁰

3) Potret Pesantren Tebuireng yang Dinamis

Jamakhshyari Dhofier menjelaskan pesantren Tebuiereng salah satu pesantren yang banyak melahirkan ulama dan kyai di penjuru Nusantara. Pesantren ini selalu dinamis terhadap perkembangan dan perubahan kebudayaan

⁴⁰Temuan ini disarikan dari hasil risetnya Abdullah Aly dalam disertasinya yang sudah diterbitkan. Baca Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di PesantrenTelaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren ModernIslam Assalam Surakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

dan peradaban. Pesantren Tebuireng beridiri pada tahun 1899 oleh KH. Hasyim Asyari. Dengan kurun waktu yang tidak panjang sekitar 10 tahun setelah berdiri menjadi pesanten besar. Karena memang sang pengasuh adalah Ulama yang tinggi keilmuannya dan sangat berwibawa.

Ada beberapa periode dalam perkembangan pesantren ini. Periode pertama adalah pada tahun 1899-1916. Pesantren ini menggunakan sistem pendidikan yang salaf yaitu dengan cara sorogan dan bandongan. Pada periode kedua pesantren melakukan pembaharuan yaitu pada tahun 1916 dan 1934. Periode ini pesanten mengembangkan pendidikan dengan model sistem madrasah. Yaitu dengan membuka tujuh jenjang kelas dan dibagi menjadi dua tingkatan. Tahun pertama dan kedua yang dinamakan *sifir awwal dan tsani*. *Sifir awwal* sebagai masa persiapan untuk memasuki madrasah untuk lima tahun berikutnya. Kurikulumnya pun selalu mengikuti perkembangan. Pada tahun 1916-1919 hanya menggunakan kurikulum pendidikan agama Islam saja. Pada tahun 1919 perkembangannya pada keilmuan lain seperti ditambah dengan pelajaran bahasa melayu, matematika dan ilmu bumi. Pada tahun 1926 berkembang ditambah dengan pelajaran bahasa Belanda dan sejarah. Periode ketiga adalah pada tahun 1934 pesantren mendirikan madrasah Nidhomiyah yang mana dalam kurikulum madrasah ditekankan pada pengetahuan umum 70%. Periode ini pesantren begitu cepat merespon perkembangan jaman. Santri dianjurkan membaca majalah dan surat kabar sebanyak mungkin. Periode keempat yaitu periodenya KH. Yusuf Hasyim pada tahun 1967 mendirikan Universitas Hasyim Asyari yang terbuka kepada mahasiswa putra dan putri. Selanjutnya pada 1971 mendirikan madrasah Huffadh yang mendidik para santri untuk menguasai pengetahuan dasar Islam juga mampu menghafal al-Quran. Dan yang terkhir adalah periode sekarang ini yang dipimpin oleh KH. Solahuddin Wahid. Periode ini juga benayak mengalami perkembangan dan menyesuaikan dengan era global.

Dewasa ini pesantren Tebuireng tidak hanya mencetak kader ulama. Namun mencetak kader ulama sekaligus intelek. Hingga sekarang bisa ditemui ada 10 jenis pendidikan yang dikelolanya. Kesepuluh jenis tersebut meliputi (1) kelas bandongan, (2) Madrasah Ibtidaiyah, (3) Sekolah persiapan tsanawiyah, (4) Madrasah Tsanawiyah, (5) Madrasah Aliyah, (6) SMP, (7) SMA, (8) Madrasah al-Huffadh, (9) Jamiyyah, (10) Universitas Hasyim Asyari. Pesantren ini banyak melahirkan tokoh-tokoh lokal maupun Nasional yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia.⁴¹ Dari dua kasus pesantren inilah hemat penulis, pesantren sebagai lembaga pendidikan agama yang akomodatif terhadap perkembangan sosial budaya.

⁴¹Kajian pesantren Tebuireng ini disarikan dari Zamakhsyar Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengena Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 170-208.

e. Kontribusi Pesantren

Pesantren sebagai wadah pendidikan Islam di masa Nusantara sampai dengan masa Negara Indonesia. Keberadaannya sudah berabad-abad lamanya hingga mengakar di jiwa bangsa Indonesia. Peradaban Indonesia kini tidak lain buah dari pendidikan pesanten. Pesantren banyak mempengaruhi aspek pendidikan, sosial, budaya, politik, keagamaan, seni, ekonomi, dan segala lini kehidupan masyarakat. Selain itu pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan peradaban Timur, Barat maupun lokal. Kemudian pesantren sebagai problem solver kepada masyarakat, dan sebagai pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitiannya Marzuki, dkk., dalam temuannya menjelaskan bahwa pesantren mampu mewujudkan pendidikan Islam multikultural. Kalangan pesantren bisa mengintegrasikan antara tradisi lama dan tradisi baru. Landasan yang dipakai itu inklusif, terbuka, dan mampu mengambil hal-hal baru untuk menerima perkembangan yang baru untuk kebaikan, sehingga pesantren bisa mengikuti arus modernitas, ataupun globalisasi, baik dalam hal pemikiran Islam, praktik pendidikan dan interaksi antar golongan. Pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh lokal maupun nasional yang pemikirannya inklusif dan moderat. Islam yang dibawa dan dikembangkan adalah Islam yang ramah, moderat, toleran dan sarat dengan nilai-nilai multikultural.⁴²

Kemudian Badrus Sholeh melihat pesantren mampu menyatu antara kajian Islam Timur Tengah bersama dengan tradisi lokal dan masyarakat. Penyatuan tradisi ini membuat karakteristik Islam Indonesia berbeda dengan Islam Timur Tengah ataupun yang lainnya. Pesantren mempunyai peran strategis lain selain berperan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan Badrus Sholeh ini untuk mengetahui peran pesantren secara dekat dalam hal peran pesantren sebagai titik temu sebuah perdamaian konflik sosial dan akulturasi dengan kearifan lokal.⁴³

Menurut Azyumardi Azra, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam Indonesia yang tradisional. Pesantren mampu bertahan hidup hingga sekarang karena melakukan akomodasi dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Pesantren juga bergerak lebih maju lagi berkaitan dengan gagasan

⁴²Marzuki, Muhammada Murdiono, Miftahuddin, *Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf*, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010, UNY (2010).

⁴³Badrus Sholeh, “‘Pesantren, Peace Building And Empowerment’: A Study Of Community Based Peace Building Initiative,” *Al-Jami’ah*, Vol. 43, No. 2, (2005/1426 H): 327-347.

kemandirian santri. Temuan-temuan ini merupakan kajian historis keberlangsungan kependidikan Islam di Indonesia di masa kini.⁴⁴

Selanjutnya Yanwar Pribadi dalam penelitiannya menjelaskan masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pendidikan Islam pesantren dan masih mempertahankan nilai-nilai sakral agama. Pola pendidikan Islam pesantren banyak juga dipengaruhi oleh tasawuf dan kearifan lokal. Dengan pengaruh itulah pola pendidikan Islam pesantren cenderung inklusif. Pesantren juga memainkan peran yang kompleks antara Islam dan politik. Penelitiannya ini fokus pada hubungan yang kompleks antara pendidikan Islam, organisasi Islam dan tokoh Islam yang mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk keberagaman dan politik masyarakat Islam pada umumnya di Indonesia.⁴⁵

Penelitiannya Florian Polh, dalam temuannya mengatakan bahwa tradisi pesantren memperhatikan pada pembangunan masyarakat (*community development*), resolusi konflik, membangun perdamaian, rekonsiliasi dan interaksi antar agama. Penelitian ini untuk mengetahui peran dan pengaruh tradisi pesantren dan masyarakat sipil.⁴⁶ Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan pendidikan berbasis aswaja. Doktrin aswaja ini melatih santri menjadi mandiri, humanis, demokratis. Lembaga ini sebagai lembaga pencetak kader ulama/kyai yang akan membimbing masyarakat ketika para santri pulang kampung. Kyai menjadi figur utama sebagai suri teladan semua santri. Santri diharapkan menjadi tokoh sebagai media masyarakat mengkaji keagamaan dan mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Santri pun memiliki jiwa nasionalisme yang dalam.⁴⁷

Peran lain pesantren sebagai media masyarakat untuk mencari titik temu bila terjadi konflik sosial. Menyatukannya dan menyesuaikan dengan dinamika lokal. Keberadaannya tidak hanya melakukan kajian keislaman dengan budaya Timur Tengah, namun juga menjaga tradisi lokal dan menggabungkannya sehingga muncul tradisi baru yang tidak dimiliki di lembaga pendidikan lain. Pesantren lebih bersifat dinamis dan terbuka mengedepankan nilai-nilai

⁴⁴Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, "Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society", Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University, Cura, (May, 6-7, 2005) & Ayumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mellinium III*, (Jakarta: Kencana, 2012).

⁴⁵Yanwar Pribadi, "Religious Networks In Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama, And Kyai As The Core Of Santri Culture," *Al-Ja'mi'ah*, Vol. 51, No. 1, (2013 M/1434 H).

⁴⁶Florian Pohl, "Islamic Education and Civil Society": Reflection Of The Pesantren Tradition In Contemporary Indonesia," *Comparative Education Review* Vol. 50, No. 3, (2006), <http://www.jstor.org/stable/10.1086/503882>, Accessed: 26/02/2014.

⁴⁷Hasan Basri, "Islamic Education In Pesantren and Terrorism," *Karsa*, vol. IX, no. 1 (2006): 854-862.

multikultural dan menghindari rasisme.⁴⁸ Tradisi keberagaman pesantren yang terbangun bisa menumbuhkan sikap inklusif.⁴⁹ Pesantren juga memainkan peran pengembangan Islam dan politik dimasyarakat Islam. Pengaruhnya sangat besar sekali.⁵⁰ Dibidang pembangunan masyarakat juga menjadi perhatian penting, seperti resolusi konflik, rekonsiliasi, menciptakan perdamaian, dan berhubungan antar agama.⁵¹

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengakulturasikan budaya. Kita ketahui bahwa proses terbangunnya peradaban Islam Nusantara ini merupakan peristiwa sejarah yang luar biasa. Proses akulturasi dan proses asimiliasi budaya menggambarkan betapa harmonisnya antara budaya lokal dan budaya asing (nilai-nilai budaya Islam) diadopsi menjadi satu dengan budaya lokal. Dalam perjalanan sejarah, pesantrenlah yang mempunyai peran itu.⁵² Pendidikan Islam pesantren bisa dilihat berhasil dari sikap yang mampu menghargai perbedaan dan pluralitas terbentuk pada santri, hidup saling menghormati, toleransi tidak bermusuhan, menghargai perbedaan budaya, suku, adat, bahasa.

PESANTREN DALAM POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA

Subbab ini mengkaji perkembangan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilihat dari sudut pandang perkembangan politik pendidikan di Indonesia. Yaitu mulai dari masa kemerdekaan hingga masa sekarang. Adapun yang menjadi objek telaah adalah Undang-Undang sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia. Telah ini menunjukkan bahwa pendidikan agama dan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia hingga sekarang merupakan upaya perjuangan.

⁴⁸Badrus Sholeh, "Pesantren Peace, Building, and Empowerment: A Study Of Community Based Space Building Inisiative," *Al-Ja>mi'ah Vol. 43, No. 2* , (2005/1426 H): 327-347.

⁴⁹Hal itu sesuai dengan temuan yang dikemukakan oleh Inayah yang telah meneliti tentang kontruksi ritus keberagaman dipesantren. Ia membantah pandangan umum mengenai identitas ritus agama yang menyebabkan keberagaman cenderung eksklusif, penyebab konflik sosial. Ia menyimpulkan ritus keberagaman cenderung inklusif. Lihat, Inayah Rohmaniyah, "Wahhabism, Identity, Secular Ritual: Graduation At An Indonesian Haigh School," *Al-Ja>mi'ah*, Vol. 50, No. 1, (2012 M/1433 H): 119-145.

⁵⁰Yanwar Pribadi, "Religious Networks in Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama, and Kyai as the Core of Santri Culture," *Al-Ja>mi'ah*, Vol. 51, No. 1, (2013 M/1434 H): 1-32.

⁵¹Florian Polh, "Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia," *Comparative Education Review*, Vol. 50, No. 3, (2006): 389-409.

⁵²Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta Barat: LP3ES, 2011), 27-37.

Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa salah satu tugas penyelenggaraan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian UUD 1945 pasal 31 secara eksplisit menjelaskan "setiap warga negara berhak mendapat pengajaran." Dari UU ini sudah jelas bahwa Negara berkewajiban mengatur segala kebutuhan pendidikan anak bangsa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Pada tanggal 25 s.d. 27 Desember 1945 pemerintah mengadakan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sehingga menghasilkan 10 rekomendasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan Nasional. Dengan serba terbatas Indonesia pada waktu, penyelenggaraan pendidikan Nasional tetap dijalankan. Dari masa kemasa sistem pendidikan nasional selalu berkembang. Hingga kini ada tiga perundangan sistem pendidikan Nasional yang pernah disahkan. Yaitu UU No. 4 tahun 1954, UU No. 2 tahun 1989, UU No. 20 tahun 2003.⁵³

1. Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam UU No. 4 Tahun 1954

UU sistem pendidikan Nasional nomor 12 tahun 1954 merupakan penetapan berlakunya UU nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno atas persetujuan DPR yang diundangkan pada 18 Maret 1954. Dalam Bab. II pasal 3 UU ini, tujuan pendidikan dan pengajaran disebutkan "membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air."⁵⁴ UU tersebut merupakan akibat dari adanya pergantian sistem pemerintahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat dan kembali lagi NKRI. Disahkan untuk mengatur dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah seluruh Indonesia.

UU tersebut hanya mengatur pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar. Pengaturan terhadap perguruan tinggi belum ada didalamnya. Sehingga masih banyak kekurangannya. Dalam konteks pendidikan agama UU ini tidak mewajibkan kepada semua siswa sekolah. Pada bab XII pasal 20 di sebutkan tentang pengajaran agama disekolah-sekolah negeri, pendidikan agama sebagai pilihan. Siswa bisa menempuh pendidikan agama dengan syarat sudah dewasa minimal kelas empat. Kedua atas kehendak siswa dan orang tua siswa. Dan ketiga pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Adapun pendidikan keagamaan tidak ada pembahasan dalam UU. Sehingga seperti pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Keberadaannya

⁵³Baca *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 2009, 1-23.

⁵⁴Baca UU no. 4 tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar.

adalah swasta yang dikelola oleh masyarakat dan atas pembiayaan mandiri tanpa campur tangan pemerintah.

2. Era Peralihan

UU No. 4 tahun 1954 belum memberikan jawaban dari apa yang terkandung dalam UU 1945 tentang mencerdaskan anak bangsa. Sehingga dalam perkembangannya muncullah TAP MPRS tahun 1960. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) No. II tahun 1960 merupakan garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana selama 8 tahun mulai dari tahun 1961-1969. Rancangan MPRS ini sebagai respon atas amanat presiden Soekarno pada tanggal 28 Agustus 1959 tentang garis-garis besar haluan pembangunan. Dalam amanat itu disebutkan bahwa garis besar haluan pembangunan berencana merupakan tahap pertama yang disusun secara nasional, dan merupakan masa peralihan. Yaitu masa peralihan dari sistem politik demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Adapun isi dari pembangunan tersebut adalah pembangunan secara rohaniyah dan pembangunan ekonomi. Yang kesemuanya itu berlandaskan pada UUD 1945.⁵⁵

Pada ketetapan MPRS ini pemerintah sudah meningkatkan perhatian terhadap pendidikan agama pada sistem pendidikan Nasional. Pada bab II pasal 2 dijelaskan bidang mental, agama, kerohanian, dan penelitian. Pendidikan agama ditetapkan sebagai mata pelajaran mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi/universitas. Namun siswa boleh tidak mengikuti jika wali murid tidak berkehendak. Artinya mata pelajaran pendidikan agama belum menjadi kewajiban bagi siswa. Lembaga pendidikan keagamaan pun belum dibahas dalam MPRS ini. Sehingga pendidikan keagamaan seperti pesantren masih terbengkalai dari perhatian pemerintahan Indonesia.

3. Era SKB 3 Menteri

Dalam TAP MPRS Nomor XVII Tahun 1966 dijelaskan “agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan nasional. Persoalan keagamaan dikelola oleh Departemen Agama, sedangkan madrasah dalam TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama”. TAP MPRS No. XXVI tahun 1966 bab I pasal I berbunyi; menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai di universitas negeri. Kemudian isi pelajaran diperjelas pada bab II

⁵⁵Baca Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) RI No. II Tahun 1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

pasal 4 untuk mempertinggi mental, modal pekerti dan memperkuat keyakinan bernegara.

SKB tiga menteri tahun 1975 yang terdiri dari menteri pendidikan, departemen agama, dan menteri luar negeri merupakan respon dari kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 5 Tahun 1974. Kepres tersebut menjelaskan bahwa menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Adapun Inpres No. 15 tahun 1974 adalah mempertegas dan petunjuk merealisasikan kepres No. 34 tahun 1972. Kepres dan Inpres itu menimbulkan ketegangan masyarakat muslim karena pendidikan agama madrasah dan pesantren tidak mendapat perhatian.⁵⁶ Bahkan madrasah dan pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan yang berada diluar sistem pendidikan nasional. Ketegangan seperti itu ada sejak adanya UU No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12 tahun 1954 yang berbicara tentang pendidikan agama saja dan tidak menyinggung pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren.

Kegelisahan yang menjadi problem lama oleh masyarakat muslim tersebut terjawab oleh SKB tiga menteri pada tanggal 24 Maret 1975. SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teuku Syarif Thayeb dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. SKB tiga menteri dibentuk bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar tingkat pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan di sekolah umum. Selanjutnya peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar tujuan dimaksudkan di atas tercapai meliputi bidang kurikulum, buku – buku pelajaran, sarana – prasarana pendidikan dan pengajar. Yang terakhir pembinaan fungsional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

Implikasi dari SKB tiga menteri tersebut membawa angin segar terhadap perkembangan pendidikan agama Islam Madrasah, antara lain; pertama, pendidikan madrasah mendapatkan pengakuan termasuk bagaian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaanya diserahkan oleh departemen agama. Kemudian alumni dari siswa madrasah terbuka bisa bekerja disemua sektor lapangan pekerjaan. Kedua madrasah secara kurikulum berstandarkan dengan lembaga pendidikan umum yang menekankan pada mata pelajaran umum 70% dan pendidikan agama 30%. Sehingga yang terjadi terhadap madrasah adalah beban pelajaran yang lebih berat. Kemudian yang ketiga kesamaan ijazah madrasah dengan pendidikan umum. Selain itu siswa madrasah bisa berpindah ke pendidikan umum atau melanjutkan jenjang yang lebih atas di sekolah umum. Esensi dari TAP MPRS 1966 dan SKB 3 Menteri adalah menciptakan anak didik yang mempunyai iman dan takwa selain penguasaan iptek. Yang mana hal itu juga dijelaskan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu

⁵⁶Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. Kemudian baca juga Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972.

mencetak sumberdaya manusia yang bertakwa. Namun dalam SKB ini pendidikan keagamaan belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, hanya sebatas lembaga pendidikan otonom dibawah naungan departemen agama. Kemudian pesantren belum menjadi perhatian juga hanya madrasah yang memenuhi standar yang bisa mendapat pengakuan.⁵⁷

4. Era 1989

Selanjutnya UU Sisdiknas yang kedua yaitu UU No. 2 tahun 1989 menempatkan pendidikan agama wajib bagi semua siswa sekolah yang diatur secara nasional mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Posisinya adalah sama dengan pelajaran lainnya hal ini diatur dalam bab IX pasal 39. Dalam UU itu pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Dalam UU ini pendidikan agama sudah menjadi peran penting dalam rangka membantu menciptakan moral/budi pekerti siswa.⁵⁸ Hanya saja lembaga pendidikan agama yang diluar dalam pengelolaan pendidikan Nasional masih dipandang sebelah mata, seperti yang terjadi oleh madrasah dan pesantren. UU ini mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan Nasional. Pendidikan keagamaan yang bisa diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional dengan mengikuti standar kurikulum pendidikan Nasional. Jika pendidikan keagamaan tidak bisa mengikuti standar yang terjadi sama seperti era sebelumnya.⁵⁹

5. Era Reformasi

Tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei sebagai moment perubahan sejarah menuju Indonesia baru. Yaitu disebut sebagai era reformasi. Agenda besar era ini adalah merubah sistem politik menjadi demokratis dan desentralisasi, mengembalikan peran ABRI yang sebenarnya, pemerintahan yang bebas KKN, menciptakan kondisi negara yang aman, tertib, dan masyarakat yang mandiri. Perubahan yang signifikan termasuk pada sistem pendidikan Nasional, sehingga terlahirlah UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. UU ini merupakan respon dari UU sistem pendidikan Nasional sebelumnya yaitu UU No.2 tahun 1989. Perubahan UU Sisdiknas ini untuk mengoreksi kembali, menyempurnakan atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam UU sisdiknas tahun 1989 dalam rangka agenda reformasi. Ada enam hal yang melatar belakangi perubahan UU tersebut. Enam hal itu adalah, pertama isu

⁵⁷Baca TAP MPRS tahun 1966 dan SKB Tiga menteri tahun 1975.

⁵⁸ Baca UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵⁹Baca Anzar Abdullah, "Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan Indonesia," *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1, 2 (2013), 213-228.

pemerataan pendidikan nasional yang belum terjadi, kedua mutu pendidikan yang masih rendah, ketiga belum berhasilnya pendidikan agama, keempat pendidikan yang belum kompatibel artinya belum siap dengan dunia kerja, kelima sistem pendidikan yang sentralistik, dan terakhir lokal wisdom yang semakin ditinggalkan. H.A.R. Tilaar mengidentifikasi empat permasalahan besar dalam pendidikan Nasional era reformasi yaitu, (1) menghadapi era global di abad 21, (2) perlunya manajemen pendidikan yang kuat dan dinamis, (4) kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) otonomi daerah sebagai dasar pembangunan daerah dan kerjasama regional.⁶⁰

UU Sisdiknas era reformasi merupakan UU Sisdiknas yang ketiga yaitu No. 20 tahun 2003. UU ini memberikan ruang yang lebih luas terhadap pendidikan agama. Pada pasal 36-37 tentang kurikulum, pendidikan agama wajib seluruh jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya pada bab IV dijelaskan pendidikan keagamaan bisa diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat secara formal, non formal maupun informal. Pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/menjadi ahli agama. Lembaga pendidikan keagamaan semisal lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dan disetarakan dengan pendidikan umum lainnya. Sehingga dengan UU ini pendidikan keagamaan semakin pesat berkembang secara kuantitas maupun kualitas.⁶¹

Desentralisasi pendidikan merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat atas kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah. Sehingga dalam desentralisasi pendidikan ini, pemerintah daerah berleluasa mengelola arah pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Dalam konteks ini pendidikan mampu menemukan jati dirinya, karena pendidikan bisa bersinergi dengan tradisi dan kebudayaan lokal atau yang disebut dengan lokal wisdom. Kedua setiap lembaga pendidikan mempunyai ciri khas masing-masing, dan lembaga sekolah semakin kreatif dan inovatif menentukan dan mengembangkan model pendidikan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, didalamnya telah dijelaskan berkeinginannya bersatu padu dengan segenap masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan secara holistik.

Namun pada konteks pendidikan Islam tidak demikian. Karena pendidikan Islam dibawah naungan kementerian agama yang masih menganut sistem sentralisasi. Walau demikian madrasah maupun pesantren mengalami perkembangan besar. Ada beberapa hal yang bisa penulis temukan pada pendidika Islam era otonom ini, yaitu lembaga madrasah/ pesantren mampu bertindak inklusif dengan masyarakat dan

⁶⁰Baca H.A.R Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Terai Indonesia, 1998).

⁶¹Baca UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

berintegrasi keilmuan agama dan umum, kedua mampu berakomodasi dengan tradisi dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat, ketiga mampu merespon kebutuhan masyarakat, dan keempat kemandirian dalam pengelolaan masih dibawah tangan masyarakat. Semenjak adanya UU sisdiknas no.20 tahun 2003 tersebut perkembangan pesanten/madrasah sampai sekarang ini bertambah pesat, bangunan fisiknya sudah mengalami perubahan, kurikulum pendidkannya sudah bisa menjawab kebutuhan zaman. UU Ini sudah mengakomodasi lembaga keagamaan yang dikelola swasta maupun yang dikelola negara. Pemerintah telah menyeteratakan dengan pendidikan lainnya. Artinya pendidikan keagamaan bagian dari pendidikan Nasional.

Perkembangan yang terakhir adalah peraturan Kementerian Agama tentang Pesantren Muadalah. Bahwa pesantren muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga pesantren dengan mengembangkan kurikulum kekhasan pesantren.⁶² Dengan adanya peraturan ini tidak perlu lagi pesantren mengikuti standar yang ditetapkan kementerian pendidikan Nasional. Namun kesetaraannya tetap diakui. Ada peluang yang bisa ditangkap oleh kalangan pesantren dari peraturan ini. Pertama Pesantren mempunyai kewenangan mengelola kurikulum pendidikan sendiri. Kedua pesantren tidak hilang jati dirinya. Ketiga pesantren mendapatkan pengakuan setara dengan pendidikan sederajat. Sehingga tidak ada alasan lagi pesantren terhambat dari aturan-aturan yang membelenggu seperti sebelumnya. Peluang besar yang bisa dikembangkan adalah pesantren mengembalikan kejayaannya seperti pada abad 17 yang banyak melahirkan Ulama yang produktif menulis hingga dikenal di dunia Internasional karyanya. Peluang yang didepan mata untuk era sekarang adalah mengembangkan integrasi keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menghilangkan nilai tradisi dan budaya lokal.

PENUTUP

Dalam tulisan ini ada dua kesimpulan besar yang bisa diambil yaitu;

1. Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia yang tertua dan akomodatif terhadap perkembangan sosial budaya Nasional maupun global. Sistem pendidikannya memuat nilai-nilai multikulturalisme. Selain itu pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan. Pesantren sangat memungkinkan menjadi lembaga yang mampu mengintegrasikan tiga peradaban besar sekaligus. Yaitu peradaban Barat, peradaban Timur, dan peradaban Nusantara. Sehingga pesantren sebagai lembaga produksi peradaban baru untuk memperkaya peradaban Nusantara.

⁶² Baca Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 Tentang Status Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

2. Pendidikan agama di Indonesia bukan semata diberikan secara cuma-cuma. Para pakar pendidikan, intelektual muslim, masyarakat, berupaya keras memperjuangkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional. Wujud keberhasilan dalam perjuangan ini adalah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, walaupun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kekurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah:

- Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asyari, Hasyim. *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama*. Penerbit Menara Kudus 1971.
- Azra, Ayumardi. *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Banks, James S. *An Introduction To Multicultural Education*. United States of America: Pearson, 2008.
- Baso, Ahmad. *Pesantren Studies 2a Buku II: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di Masa Kolonial*. Jakarta: Pustaka Afid, cet. 3, 2013.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Gorski, Paul C. *Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations*. New York: McGraw-Hill, 2005.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) RI No. II Tahun 1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
- Nata, Abuddin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Noor, Ahmad Syafi'i. *Orientasi Pengembangan Pendidikan Pesantren Tradisional*, Jakarta: Prenada, 2009.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta*, Jakarta: Pustaka IIMan, 2012.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia, 2004.
- Tilaar, H.A.R. "Multikulturalisme, Bahasa Indonesia, dan Nasionalisme dalam Sistem Pendidikan Nasional," Makalah Disampaikan pada Seminar International bertema, *Pendidikan Berbasis Keragaman Budaya: Sumbangan*

Bahasa dan Sastra Indonesia, di Syahida Inn, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 4-6 November 2014.

Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Terai Indonesia, 1998.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyyah Cetakan ketiga, 2008.

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 4 tahun 1954 tentang pendidikan dan pengajaran pada sekolah dasar.

UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jurnal:

Abdullah, Anzar. "Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan Indonesia." *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*. 1, 2 (2013), 213-228.

Ansori, Ahmad & Indriyani Makrifah. "Model Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam," *Mukaddimah*. vol.19, no.1 (2013).

Azra, Azyumardi & Dina Afriyanti. "Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society", Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University, Cura, (May, 6-7, 2005).

Bano, Masooda. "Madrasas as Partners in Education Provision: The South Asian Experience." *Development in Practice*, Vol. 20, No. 4/5 (2010): 554-556. <http://www.jstor.org/stable/20750152> (accessed June 10, 2014).

Basri, Hasan. "Islamic Education In Pesantren and Terrorism." *Karsa*, vol. IX, no. 1 (2006): 854-862.

Butt, Tahir Mehmood. "Social and Political Role of Madrassa: Perspectives of Religious Leaders in Pakistan." *South Asian Studies Vol.27 No.2* (2012): 387-407, http://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/6.%20Tahir%20Mehmood%20Butt_V28_no2_12.pdf. (accessed June 2, 2014).

Emerson, Michael O., David Hartman. "The Rise Religious Fundamentalism." *Annual Reveiw Of Sociology* 32 (2006): 127-144.

Hoon, Chang-Yau. "Mapping 'Chinese' Christian Schools in Indonesia: Ethnicity, Class and Religion," *Asia Pacific Educ. Rev.* (2011): 403-41.

Lai, Yue Sum Sharon Lai, Kaili Chen Zhang. "A Comparison on Inclusive Practices for Children with Special Needs in Faith-Based Kindergartens in Hong Kong." *J Relig Health* 53 (2013) : 809-824.

Lubis, Maemun Aqso, dkk. "The Application of Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia." *Issue 8, Vol 6* (2009): 401-1411, www.academia.edu/990508/The_application_of_multicultural_education_and

- _applying_ICT_on_pesantren_in_South_Sulawesi_Indonesia?login=irham.yu.wanamu@gmail.com&email_was_taken=true, (accessed May 28, 2014).
- Marzuki, Muhammada Murdiono, Miftahuddin. *Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf*, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010. UNY (2010).
- Moadded, Mansoor, Stuart A. Karabenick, "Religious Fundamentalism among Young Muslim Egypt and Saudi Arabia," *Social Forces* Vol. 86, No. 4 (2008): 1675-1710.
- Moadded, Mansoor, Stuart A. Karabenick. "Religious Fundamentalism among Young Muslim Egypt and Saudi Arabia." *Social Forces*, Vol. 86, No. 4 (2008): 1675-1710.
- Niyozov, Sarfaroz. "Teachers and Teaching Islam and Muslims in Pluralistic Societies: Claims, Misunderstandings, and Responses." *Int. Migration & Integration* 11, (2010): 23-40.
- Polat, Soner. "The Attitudes of School Directors to the Multiculture Education in Turkey." *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol.2 No.2 (2011): 385-393.
- Pribadi, Yanwar. "Religious Networks In Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama, And Kyai As The Core Of Santri Culture." *Al-Jami'ah*, Vol. 51, No. 1, (2013 M/1434 H).
- Pohl, Florian. "Islamic Education and Civil Society': Reflection Of The Pesantren Tradition In Contemporary Indonesia." *Comparative Education Review*. Vol. 50, No. 3, (2006), <http://www.jstor.org/stable/10.1086/503882>, Accessed: 26/02/2014.
- Reetz, Dietrich. "Travelling Islam – Madrasa Graduates from India and Pakistan in the Malay Archipelago." *ZMO Working Papers*. 8, (2013): 1-19, http://www.zmo.de/publikationen/WorkingPapers/reetz_2013.pdf. (accessed May 29, 2014).
- Rohmaniyah, Inayah. "Wahhabism, Identity, Secular Ritual: Graduation At An Indonesian High School." *Al-Jami'ah*. Vol. 50, No. 1, (2012 M/1433 H): 119-145.
- Sholeh, Badrus. "'Pesantren, Peace Building And Empowerment': A Study Of Community Based Peace Building Initiative." *Al-Jami'ah*. Vol. 43, No. 2, (2005/1426 H): 327-347.
- Tayob, Abdulkader Politics and Islamization in African Public Spheres." *Islamic Africa*. Vol. 3, No. 2 (2012): 139-168, <http://www.jstor.org/stable/42636199>, (accessed May, 28 2014).
- Toft, Monica Duffy. "Getting Religion? The Puzzling Case of Islam and Civil War." *International Security*. Vol. 31, No. 4 (2007): 97-131, <http://www.jstor.org/stable/4137567>. (accessed May 28, 2014).

Trijono, Lambang dkk. (eds.), *Potret Retak Nusantara Studi Kasus Konflik Di Nusantara*. Yogyakarta: UGM, 2004.

Wei, Li “Integration of Multicultural Education into English Teaching and Learning: A Case Study in Liaoning Police Academic.” *Academi Publisher*. vol. 3, no. 4 (2013): 612-619.

